KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Call Center: 150145, Pos-el: setjen@kemenham.go.id
Laman: www.kemenham.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : SEK-1143.KP.02.01 TAHUN 2026

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 672 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2026 **KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

A.	**Unit Pusat Kementerian Hak Asasi Manusia**	
1	Sekretariat Jenderal	
2	Inspektorat Jenderal	
3	Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia	
4	Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia	
5	Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia	
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia	
B.	**Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia**	
	Kantor Wilayah	Wilayah Kerja
1	Kantor Wilayah Aceh	Aceh
2	Kantor Wilayah Sumatera Utara	a. Sumatera Utara b. Kepulauan Riau
3	Kantor Wilayah Sumatera Barat	a. Sumatera Barat b. Riau
4	Kantor Wilayah Jambi	Jambi
5	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
6	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	a. Sumatera Selatan b. Bengkulu
7	Kantor Wilayah Lampung	Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Kantor Wilayah Banten	Banten
9	Kantor Wilayah Jawa Barat	Jawa Barat
10	Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta	Daerah Khusus Jakarta
11	Kantor Wilayah Jawa Tengah	a. Jawa Tengah b. Daerah Istimewa Yogyakarta
12	Kantor Wilayah Jawa Timur	Jawa Timur
13	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	a. Nusa Tenggara Timur b. Nusa Tenggara Barat c. Bali
14	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	a. Kalimantan Tengah b. Kalimantan Barat
15	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	a. Kalimantan Timur b. Kalimantan Utara
16	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
17	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
18	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	a. Sulawesi Tengah b. Gorontalo c. Sulawesi Utara
19	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	a. Sulawesi Selatan b. Sulawesi Tenggara
20	Kantor Wilayah Papua Barat	a. Papua Barat b. Papua c. Papua Barat Daya d. Papua Pegunungan e. Papua Tengah f. Papua Selatan g. Maluku h. Maluku Utara

II. JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi tercantum dalam Lampiran I. Deskripsi jabatan dan rentang penghasilan setiap jabatan tercantum dalam Lampiran II. Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan umum adalah pelamar lulusan perguruan tinggi dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
2. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan, serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Pelamar penyandang disabilitas juga dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, dengan menyatakan statusnya sebagai penyandang disabilitas pada SSCASN serta melampirkan surat keterangan dokter dan video singkat tersebut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*) adalah pelamar dengan jenjang pendidikan paling rendah sarjana/diploma empat yang lulus dengan predikat "dengan pujian" (*cum laude*) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan pada ijazah, atau pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang melampirkan dokumen penyetaraan ijazah dan dokumen yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya setara dengan "dengan pujian" (*cum laude*). Kebutuhan ini hanya tersedia pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
4. Kebutuhan khusus putra/putri Papua adalah pelamar putra/putri Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;
5. Pelamar memilih jenis kebutuhan (umum atau khusus), jabatan, dan unit kerja penempatan pada SSCASN.

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima) tahun** pada saat melakukan pendaftaran dalam laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan Ijazah asli yang diunggah pada saat pengisian DRH setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah atau rumah sakit TNI/Polri yang diunggah pada saat pengisian DRH setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
9. Bersedia ditempatkan pada Unit Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
11. Tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi pengadaan pegawai ASN lainnya dan/atau peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba/NAPZA dari unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan kesehatan pemerintah, rumah sakit TNI/Polri, atau badan/lembaga yang berwenang melakukan pengujian narkoba, yang diunggah pada saat pengisian DRH setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;

13. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
14. Pelamar merupakan lulusan:
    a. Kebutuhan Jabatan Widyaiswara Ahli Pertama:
        1) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
        2) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Magister S-2 dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau di bidang agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
    b. Kebutuhan Jabatan Analis Hak Asasi Manusia Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama:
        1) Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 atau Diploma IV (D-IV) sesuai program studi yang dipersyaratkan pada Lampiran I dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
        2) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan kualifikasi pendidikan Sarjana S-1 atau Diploma IV (D-IV) sesuai program studi yang dipersyaratkan pada Lampiran I dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau di bidang agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
    c. Kebutuhan Jabatan Pengadministrasi Perkantoran:
        1) Lulusan SLTA Sederajat yang berasal dari Sekolah Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan/atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
        2) Lulusan SLTA sederajat dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun dan melakukan pendaftaran secara daring pada laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
3. Pelamar diwajibkan untuk mengingat *username* dan *password* pada akun pendaftaran;
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan kebutuhan CPNS;
5. Dalam hal Pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) jabatan dan/atau 1 (satu) unit kerja/penempatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi berupa verifikasi dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id ;
2. Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan *Computer Assisted Tes*t (CAT) BKN dengan bobot 40% dari total nilai akhir;
3. Seleksi Kompetensi Bidang dengan bobot 60% dari total nilai akhir, terdiri dari:
   a. Substansi jabatan menggunakan *Computer Assisted Tes*t (CAT) BKN dengan bobot 50% dari total nilai SKB;
   b. Tes Praktik Kerja dengan bobot 40% dari total nilai SKB;
   c. Wawancara dengan bobot 10% dari total nilai SKB.

Lokasi pelaksanaan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2026 dilaksanakan pada unit kerja Badan Kepegawaian Negara, unit kerja Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia atau lokasi lain yang telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara.

VII. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar wajib mengunggah dokumen pada saat melakukan pendaftaran melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id berupa:

1. Dokumen Persyaratan Kebutuhan Jabatan Non SLTA
   a. Kebutuhan Umum
      1) *Scan* berwarna Surat Lamaran dan Pernyataan yang dihasilkan dan diunduh dari laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id ditandatangani oleh pelamar menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, serta dibubuhi meterai tempel atau meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000,00;
      2) *Scan* berwarna Transkrip Nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
      3) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib menyertakan *scan* berwarna Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau di bidang agama (dokumen digabungkan dengan transkrip nilai);
      4) Tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari laman https://banpt.or.id yang memuat status akreditasi program studi Pelamar atau surat akreditasi Perguruan Tinggi pelamar yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Informasi akreditasi program studi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau perguruan tinggi juga dapat diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, termasuk akreditasi yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

b. Kebutuhan Penyandang Disabilitas
   1) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5);
   2) *Scan* berwarna surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   3) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

c. Kebutuhan Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" (*Cum Laude*)
   1) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5);
   2) Scan berwarna transkrip nilai atau surat keterangan lulus yang mencantumkan predikat kelulusan "dengan pujian" (*cum laude*); predikat dan tanggal kelulusan dibuktikan dengan ijazah yang diunggah pada saat pengisian DRH;
   3) Status akreditasi A/unggul perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan dibuktikan dengan dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5);
   4) Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan dokumen penyetaraan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan kesetaraan kualifikasi pendidikan dengan jenjang pendidikan pada jabatan yang dilamar, serta dokumen yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya setara dengan "dengan pujian" (*cum laude*), yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

d. Kebutuhan Putra/Putri Papua
   1) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5), atau angka 2 huruf a sampai dengan huruf c bagi pelamar pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat;
   2) Scan berwarna akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
   3) Scan berwarna surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

2. Dokumen Persyaratan Kebutuhan Jabatan SLTA
   a. *Scan* berwarna Surat Lamaran dan Pernyataan yang dihasilkan dan diunduh dari laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id ditandatangani oleh pelamar menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, serta dibubuhi meterai tempel atau meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000,00**;**
   b. Bagi pelamar lulusan sekolah luar negeri, wajib menyertakan scan berwarna surat penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (dokumen digabungkan dengan daftar/transkrip nilai).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id sebagaimana dalam pengumuman;
2. Pelamar yang dokumen pelamarannya tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak diberikan kartu peserta ujian;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
4. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, yaitu untuk kebutuhan umum paling rendah 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 166 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), untuk kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" (*cum laude*) nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dengan nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) paling rendah 85, serta untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dengan nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) paling rendah 60.
5. Pelamar pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2026 dapat memilih untuk menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara pada laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan pada saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;
   b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;
   c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun 2026;
   d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun 2026;
   e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
   f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun 2026.
6. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2026. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun 2026, maka nilai yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun 2026. Pelamar yang memilih mengikuti SKD tahun anggaran 2026 hanya dapat menggunakan nilai tersebut pada pengadaan PNS berikutnya, dan nilai SKD tahun anggaran 2026 dinyatakan tidak berlaku apabila pelamar memilih mengikuti SKD kembali pada pengadaan tersebut. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 pada pengumuman hasil seleksi administrasi;
7. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang masuk dalam peringkat terbaik 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan berdasarkan nilai total SKD tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas pada masing-masing jabatan dengan jenis kebutuhan dan pengelompokan yang sama, dengan ketentuan apabila terdapat nilai SKD yang sama pada batas peringkat tersebut, penentuan dilakukan secara berurutan berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nilai TKP, TIU, dan TWK, dan apabila nilainya masih sama, seluruh pelamar tersebut diikutkan SKB;

8. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya. Hasil akhir diumumkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Hak Asasi Manusia dalam jumlah yang tidak melebihi kebutuhan pada masing-masing jabatan. Dalam hal nilai akhir sama, kelulusan ditentukan secara berurutan berdasarkan nilai kumulatif SKD tertinggi, nilai TKP, TIU, dan TWK tertinggi, Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi (bagi lulusan SLTA/sederajat berdasarkan nilai rata-rata ijazah tertinggi), dan usia pelamar tertinggi.

IX. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggung jawab atas dokumen unggahan yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Hal tersebut merupakan kelalaian pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar gugur atau tidak lulus;
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggah setelah melakukan verifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Jawaban sanggah disampaikan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam pengumuman ini. Dalam hal alasan sanggah diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggah melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
4. Peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi, atau tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dengan alasan apa pun, dinyatakan gugur;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi diketahui terdapat keterangan atau data pelamar yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau surat pernyataan yang telah ditandatangani, Panitia Seleksi Instansi menggugurkan pelamar yang bersangkutan. Apabila hal tersebut diketahui setelah pengumuman kelulusan akhir sampai dengan penetapan nomor induk pegawai, Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri atau dibatalkan kelulusannya, Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan tersebut dan dapat mengusulkan penggantian kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk memperoleh pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama. Penggantian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau telah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2026 **tidak dipungut biaya**;
9. **Kelulusan pelamar sepenuhnya ditentukan oleh prestasi pelamar sendiri. Panitia tidak bertanggung jawab atas pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun. Tindakan tersebut merupakan penipuan dan berada di luar tanggung jawab Panitia;**
10. Pelamar dilarang memberikan atau menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan seleksi pengadaan CPNS Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2026. Pelanggaran atas larangan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelulusan pelamar yang bersangkutan digugurkan. Pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan seleksi dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN selama 3 (tiga) tahun;
11. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final setelah melalui mekanisme sanggah sebagaimana diatur dalam pengumuman ini;
12. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
13. Data dan dokumen pelamar hanya digunakan untuk keperluan seleksi, dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan pelindungan data pribadi, dan tidak dikembalikan kepada pelamar;
14. Pelamar atau peserta agar secara berkala memantau perkembangan informasi pada laman https://sscasn.bkn.go.id , laman https://kemenham.go.id , dan media sosial resmi Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Instagram @kementerian_ham;
15. Layanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2026 dapat disampaikan melalui Call Center Kementerian Hak Asasi Manusia pada +62 811-9961-012 (hanya teks *Whatsapp*);
16. Seluruh soal dan jawaban dalam pelaksanaan tes bersifat rahasia, hanya milik panitia seleksi nasional dan/atau panitia seleksi instansi;
17. Pengumuman ini untuk diketahui dan dapat disebarluaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 09 Desember 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi Administrasi	27 November s.d. 04 Januari 2027
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5.	Masa Sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab Sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8.	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9.	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi SKD CPNS	27 Januari s.d. 01 Februari 2027
11.	Pelaksanaan SKD CPNS	02 s.d. 21 Februari 2027
12.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	01 s.d. 07 Maret 2027
14.	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18.	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 06 April 2027
19.	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	03 s.d. 12 April 2027
20.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21.	Pengumuman Hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22.	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23.	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	29 s.d. 30 April 2027
26.	Pengisian DRH NIP CPNS	03 s.d. 17 Mei 2027
27.	Usul Penetapan NIP CPNS	08 s.d. 22 Mei 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman ***https://kemenham.go.id.*** Panitia tidak bertanggung jawab atas informasi lain selain dalam laman dan media sosial resmi Kementerian Hak Asasi Manusia.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 November 2026

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Novita Ilmaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi
Nomor : SEK-1143.KP.02.01 TAHUN 2026
Tanggal : 27 November 2026

JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI CPNS
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2026

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS					ALOKASI PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUM LAUDE	PUTRA/ PUTRI PAPUA	TOTAL	
1	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	- S-2 KEBIJAKAN PUBLIK - S-2 MANAJEMEN - S-2 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-2 EKONOMI - S-2 HUKUM - S-2 ADMINISTRASI PUBLIK - S-2 ADMINISTRASI NEGARA	5	-	-	-	5	UNIT PUSAT
2	ANALIS HAK ASASI MANUSIA AHLI PERTAMA	- S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 PSIKOLOGI	571	20	-	48	639	UNIT PUSAT DAN WILAYAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS					ALOKASI PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUM LAUDE	PUTRA/ PUTRI PAPUA	TOTAL	
		- S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU EKONOMI						
3	AUDITOR AHLI PERTAMA	- S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU EKONOMI	28	2	-	-	30	UNIT PUSAT
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	- S-1 ILMU HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU EKONOMI	14	2	10	-	26	UNIT PUSAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS					ALOKASI PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUM LAUDE	PUTRA/ PUTRI PAPUA	TOTAL	
		- S-1 ILMU MANAJEMEN						
5	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	- S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU HUKUM	6	-	-	-	6	UNIT PUSAT
6	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	- D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 JURNALISTIK - S-1 ILMU HUKUM	20	1	-	-	21	UNIT PUSAT
7	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	- D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	6	-	-	-	6	UNIT PUSAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS					ALOKASI PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUM LAUDE	PUTRA/ PUTRI PAPUA	TOTAL	
		- S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 SISTEM KOMPUTER						
8	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	245	-	-	22	267	UNIT PUSAT DAN WILAYAH
	TOTAL		**895**	**25**	**10**	**70**	**1000**	

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Novita Ilmaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi
Nomor : SEK-1143.KP.02.01 TAHUN 2026
Tanggal : 27 November 2026

DESKRIPSI JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2026

NO	JABATAN	DESKRIPSI JABATAN	RENTANG PENGHASILAN
1	Widyaiswara Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta mengembangkan materi pembelajaran di bidang hak asasi manusia.	Rp7.498.750 s.d. Rp9.363.950 per bulan
2	Analis Hak Asasi Manusia Ahli Pertama	Melaksanakan analisis dan penyiapan bahan kebijakan, pemajuan, pelayanan, serta kepatuhan hak asasi manusia sesuai unit penempatan.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
3	Auditor Ahli Pertama	Melaksanakan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan pada lingkup Kementerian Hak Asasi Manusia.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Melaksanakan analisis kebijakan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Melaksanakan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan informasi, komunikasi publik, publikasi, dan hubungan masyarakat.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta data.	Rp7.380.850 s.d. Rp9.170.350 per bulan
8	Pengadministrasi Perkantoran	Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, meliputi pengelolaan surat, arsip, data, dan dukungan administrasi unit kerja.	Rp5.318.250 s.d. Rp6.777.650 per bulan

* Selama menjadi CPNS, gaji pokok dan tunjangan kinerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Novita Ilmaris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).